

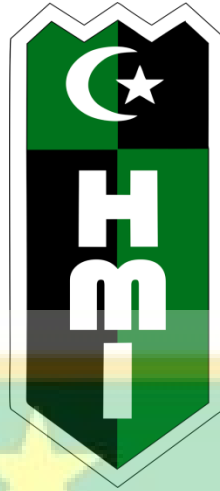
BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam

Sejarah berdirinya suatu organisasi merupakan sebuah hal yang menjadi pondasi awal atas dasar dan tujuan suatu organisasi dapat terbentuk, biasanya terbentuknya sebuah organisasi ada latar belakang yang mendasari berdirinya suatu organisasi tersebut baik latar belakang kondisi sosial, ekonomi, maupun kondisi politik yang terjadi di masyarakat dalam suatu negara. Sehingga dengan dibentuknya organisasi akan mampu mengatasi segala kondisi yang terjadi di masyarakat atau di sebuah negara.

Himpunan Mahasiswa Islam adalah salah satu organisasi yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ir. Soekarno dengan kondisi yang terjadi di Indonesia pada saat itu adalah masih dalam kondisi pasca kemerdekaan dan masih dalam bayang-bayang serangan dari tentara belanda yang saat itu masih ingin menguasai Republik Indonesia, akhirnya salah satu mahasiswa dari STI (Sekolah Tinggi Islam) yang saat ini bernama Universitas Islam Indonesia yang berada di Yogyakarta menjadi saksi nyata bahwa pada tanggal 5 Februari 1947 M atau 14 Rabiul Awal 1366 H, yang dalam dalam penanggalan lainnya juga tepat pada hari Rabun Pon 1878 Tahun Saka berdirilah salah satu organisasi mahasiswa yang diberi nama Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat HMI.



Gambar 4.1 Lambang Himpunan Mahasiswa Islam

Sumber : yakusaaa.blogspot.com

Lafran Pane adalah nama dari seseorang yang menjadi aktor utama berdirinya HMI, seorang mahasiswa kelahiran Padang Sidempuan pada tanggal 5 Februari tahun 1922 adalah sosok yang memiliki intelektualitas dan kemauan yang tinggi dalam dirinya. Lafran pane adalah anak bungsu atau anak terakhir dari keluarga Sutan Pangurabaan Pane dan memiliki enam saudara lainnya, yaitu Nyonya Tarib, Sanusi Pane, Armijn Pane, Nyonya Bahari Siregar, Nyonya Hanifah, dan yang terakhir Lafran Pane.¹²

Namun Lafran Pane bukanlah satu-satunya aktor dalam pendirian HMI, terdapat beberapa nama lain yang turut serta dalam pembentukan HMI hasil dari gagasan pemikiran Lafran Pane. Nama-nama lain tersebut adalah Kartono Zarksy, Siti Zainah, Dahlan Husein, Maisaroh Hilal, Tayeb Razak, Yusdi Ghozali,

¹² Merdeka.com (2021, 5 Februari), Sejarah 5 Februari: Lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam, Ormawa Tertua di Indonesia. diakses pada 9 Mei 2022, dari <https://www.merdeka.com/jateng/sejarah-5-februari-lahirnya-himpunan-mahasiswa-islam-ormawa-tertua-di-indonesia>

Mansyur, M. Anwar, Hasan Basri, Marwan, Zulkarnaen, Suwali, Toha Mashudi, dan Bidron Hadi.² Yang mana nama tersebut juga telah sesuai dengan salah satu hasil keputusan dalam Kongres ke-11 HMI yang bertempat di bogor bahwa pendiri HMI berasal dari mahasiswa STI yang hadir dalam rapat pembentukan yang di pimpin oleh Lafran Pane.

Selain untuk mempertahankan kemerdekaan dari jajahan belanda pendirian HMI juga di dasari pada intelektulitas dan pemikiran-pemikiran matang dari para pendirinya dimana ada motivasi besar yang dibangun dalam hal kepemudaan, keislaman, dan keindonesiaan pada saat itu, terlebih saat itu mahasiswa juga telah mendirikan organisasi mahasiswa guna kepentingan perjuangan yang di tandai dengan berdirinya Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) yang menjadi awal mula munculnya organisasi lainnya. Tetapi dalam kondisi Indonesia yang belum lama merdeka dan upaya pemerintah untuk mewujudkan situasi politik yang demokratis maka banyak muncul partai-partai politik yang berlandaskan ideologi seperti Partai Masyumi, Partai Nasional Indonesia, Partai Sosialis Indonesia.

Dengan lahirnya partai politik dengan ideologi yang kuat membuat PMY juga mulai tertarik dengan salah satu partai politik yaitu Partai Sosialis dan berdampak pada pergerakannya yang lebih kearah komunis, ini tentu saja bertolak belakang dengan mahasiswa islam pada saat itu yang cukup banyak sehingga semakin membuat mereka semakin mantap untuk mendirikan organisasi mahasiswanya sendiri dan hal tersebut di tanggapi oleh Lafran Pane.

¹³ Solichin, *HMI Candradimuka Mahasiswa* (Jakarta: Sinergi Persadatama Foundation, 2010), hlm. 5

Motivasi dasar dalam pembentukan HMI juga adalah keinginan untuk melihat Islam lebih berkembang dengan baik di Indonesia dengan hadirnya suatu wadah yang akan bertindak sebagai pengkaderan para mahasiswa, HMI harus mampu mengatasi kemelaratan, penindasan, dan HMI harus turut mempertahankan negara Republik Indonesia baik dalam negeri maupun luar negeri serta mengusahakan kemakmuran rakyat.³ Karena dasar itulah hingga saat ini HMI masih berfokus dalam upaya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan status sosial yang terjadi di Indonesia dengan memakmurkan masyarakat dan berupaya memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.1.1 Tujuan Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam

Tujuan merupakan salah satu organ inti dari suatu organisasi seperti halnya tujuan Himpunan Mahasiswa Islam karena dengan adanya tujuan maka perjalanan dari sebuah organisasi akan teratur dan tertuju pada satu tujuan yang pasti sehingga anggota organisasi Himpunan Mahasiswa Islam berjalan dan berdinamika guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh para pendiri Himpunan Mahasiswa Islam yang terdahulu.

Dalam perjalanan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI tentulah memiliki tujuan dalam tubuh organisasinya, yang mana tujuan tersebut telah terumuskan secara matang dan disetujui oleh segenap kader Himpunan Mahasiswa Islam dan tercantum dengan jelas terdapat di dalam tubuh AD ART pasal 4 yang berbunyi :

¹⁴ Sidratahta Mukhtar, Op.Cit., hal. 30

“TERBINANYA INSAN AKADEMIS, PENCIPTA, PENGABDI YANG BERNAFASKAN ISLAM DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR YANG DI RIDHOI ALLAH SUBHANAHU WATAALA”.

Dengan tujuan yang bahkan tercantum dalam AD ART HMI maka tujuan tersebut tentu menjadi tanggung jawab setiap kader dalam perjalanan organisasinya, dalam menggapai tujuan tersebut HMI melakukan berbagai macam tingkat pendidikan para kadernya agar mampu menciptakan kader-kader HMI yang memiliki kualitas Insan Cita mumpuni sehingga mampu untuk dapat menjadi panutan di lingkungan masyarakat.

Tujuan HMI bukan hanya semata-mata untuk melengkapi berdirinya organisasi, tetapi tujuan tersebut juga menjadi harapan dengan adanya HMI maka akan mampu menciptakan kader-kader terbaik yang akan membangun bangsa Indonesia kearah yang lebih baik dan membawa masyarakat Indonesia secara keseluruhan dalam keadaan yang adil dan juga makmur hingga menghilangkan berbagai ketimpangan sosial yang terjadi seperti antara yang kaya dan miskin.

Guna mencapai tujuan tersebut tentu berbagai inovasi dilakukan oleh HMI salah satunya dengan usaha-usaha yang akan menjadi akar utama dalam upaya meningkatkan kualitas insan cita yang dimilikinya sesuai dengan pasal tujuan HMI yaitu pasal 4 AD HMI, terlebih dengan tujuan tersebut setidaknya terdapat beberapa kualitas yang harus dimiliki setiap kader HMI dalam mendorong terwujud dan tercapainya tujuan tersebut yang mana kualitas insan cita yang harus

dimiliki dan setidaknya terdapat 17 indikator yang secara spesifik harus dimiliki oleh para kader HMI. Kualitas tersebut adalah :

1) Kualitas Insan Akademis.

- a) Berpendidikan tinggi, berpengetahuan luas, berpikir rasional, objektif, dan kritis. Dengan memiliki pengetahuan luas tentunya setiap kader HMI bukan hanya sekedar memberikan kritik tetapi harus mampu memberikan sebuah solusi atas segala bentuk permasalahan yang terjadi.
- b) Memiliki kemampuan teoritis, mampu memformulasikan apa yang diketahui dan di rahasiakan, selalu tanggap menghadapi suasana sekelilingnya dengan kesadaran. Kesadaran akan tujuan utama organisasi menjadi salah satu faktor kesigapan segenap kader HMI.
- c) Sanggup berdiri sendiri dengan penguasaan ilmu pengetahuan sesuai ilmu pilihannya, baik secara teoritis maupun teknis. Sanggup bekerja secara ilmiah yaitu secara bertahap, teratur, mengarah pada tujuan sesuai prinsip-prinsip perkembangan.

Sebagai organisasi kemahasiswaan sudah pasti setiap kader HMI adalah mahasiswa, maka dari itu setiap kader haruslah memiliki tingkat pendidikan yang mumpuni, berpengetahuan yang luas serta harus memiliki sikap kritis akan setiap kondisi sosial yang ada. Karena dengan memiliki pendidikan tinggi dan pengetahuan luas kader HMI akan menjadi harapan masyarakat dalam membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan mampu memecahkan persoalan yang ada dengan pemikiran yang kritis dan objektif.

2) **Kualitas Insan Pencipta Insan Akademis, Pencipta.**

- a) Sanggup melihat kemungkinan-kemungkinan lain lebih dari sekedar yang ada dan bergairah menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih baik dan bersikap dengan bertolak dari apa yang ada (yaitu Allah). Berjiwa penuh dengan gagasan-gagasan kemajuan, selalu mencari perbaikan dan pembaharuan.
- b) Bersifat independen dan terbuka, tidak isolatif. Insan yang potensi kreatifnya dapat berkembang. Independen dengan tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun dan untuk kepentingan siapapun yang akan merusak kondisi di tengah-tengah masyarakat.
- c) Dengan ditopang kemampuan akademis, ia mampu melaksanakan kerja kemanusiaan bernafaskan ajaran Islam. Islam sebagai pedoman pasti dan ajaran yang senantiasa memberikan jawaban dalam sebuah kesusahan.

Insan pencipta yang mengharuskan kader HMI memiliki kualitas pencipta dengan ilmu pengetahuan yang di dapat dari akademis harus mampu mengimplementasikan kedalam kehidupan, dengan berfikir kreatif dan tidak kaku dalam melihat setiap sudut pandang yang berbeda maka kader HMI akan memiliki kualitas Insan Pencipta seperti mampu menciptakan sebuah usaha yang akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sehingga taraf kehidupan dan tingkat pengangguran di Indonesia dapat teratasi berkat kualitas Insan kader HMI.

3) **Kualitas Insan Pengabdian : Insan Akademis, Pencipta, Pengabdian.**

- a) Ikhlas dan sanggup berkarya demi kepentingan orang banyak atau untuk sesama umat.
- b) Sadar membawa tugas insan pengabdian, bukan hanya membuat dirinya baik tetapi juga kondisi sekelilingnya baik.
- c) Insan akademis, pencipta dan pengabdian adalah yang bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dan ikhlas mengamalkan ilmunya untuk kepentingan sesama.

Dengan kualitas akademis dan kualitas pencipta yang telah dimiliki maka diharapkan kader HMI telah sadar akan tugas penting yang diemban selanjutnya yaitu untuk dapat mengabdikan kepada masyarakat dan juga negara untuk membawa kearah yang lebih baik yaitu arah kemakmuran, dengan mengabdikan segala ilmu dan pikiran dalam dirinya dengan ikhlas dan akan berguna untuk sesamanya bukan hanya diri pribadi niscaya akan mampu mewujudkan tujuan dari HMI itu sendiri.

4) Kualitas Insan yang bernafaskan Islam : Insan Akademis, Pencipta dan Pengabdian yang Bernafaskan Islam.

- a) Islam yang telah menjiwai dan memberi pedoman pola pikir dan pola pelakunya tanpa memakai sebutan islam. Islam akan menjadi pedoman dalam berkarya dan mencipta sejalan dengan nilai-nilai universal Islam. Dengan demikian Islam telah menafasi dan menjiwai karyanya.
- b) Ajaran Islam telah berhasil membentuk “unity personality” dalam dirinya. Nafas Islam telah membentuk pribadi yang utuh, terhindar dari split personality, tidak pernah ada dilema pada dirinya sebagai warga negara dan

dirinya sebagai muslim. Insan ini telah mengintegrasikan sukses pembangunan nasional bangsa ke dalam sukses perjuangan umat Islam Indonesia dan sebaliknya.

Dengan latar belakang sebagai mahasiswa islam tentu sudah dijabarkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa menolong sesama adalah sebuah kebaikan maka dapat diartikan kalau menolong masyarakat keluar dari ketimpangan sosial dan membawa kearah kemakmuran merupakan sebuah kebaikan yang harus dilakukan setiap kader HMI, karena dalam islam sudah diajarkan dan sudah memberikan pedoman bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya maka wajib hukumnya setiap kader HMI berjalan sesuai dengan ajaran Islam.

5) Kualitas Insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah SWT.

- a) Insan akademis, pencipta dan pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.
- b) Berwatak sanggup memikul akibat-akibat perbuatannya, sadar bahwa menempuh jalan yang benar memerlukan keberanian moral.
- c) Spontan dalam menghadapi tugas, responsif dalam menghadapi persoalan-persoalan, dan jauh dari sikap apatis.
- d) Rasa tanggung jawab, taqwa kepada Allah SWT, yang berperan aktif dalam satu bidang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

- e) Korektif terhadap setiap langkah yang berlawanan dengan usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sebagai tujuan utama dari Himpunan Mahasiswa Islam pastilah akan melawan segala macam bentuk yang berupaya menghambat kemakmuran bagi masyarakat.
- f) Percaya pada diri sendiri dan sadar akan kedudukannya sebagai “khalifah lil ard” yang harus melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.⁴

Terwujudnya kondisi masyarakat yang adil dan makmur haruslah menjadi rasa tanggung jawab terbesar bagi kader HMI, dengan ilmu di bidang akademis dan dengan menasibkan dirinya untuk mengabdikan kepada negara serta berjalan dengan nilai-nilai keislaman maka memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk dapat mewujudkan masyarakat adil makmur dengan niat guna mendapatkan ridho dari Allah SWT dengan penuh ketaqwaan yang dimilikinya.

Dengan tujuan dan kualitas insan cita yang dimiliki oleh setiap kader HMI maka secara garis besar tujuan dari HMI sendiri adalah berupaya untuk meningkatkan kualitas akademik maupun kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dari seorang mahasiswa yang menjadi kader HMI dengan tujuan akhir adalah mampu untuk membangun Indonesia kearah yang lebih baik dengan keadilan yang merata dan kemakmuran yang dapat dirasakan oleh segenap warga negara tanpa ada hal yang menghalanginya dengan tidak melupakan nilai-nilai Islam sebagai landasan pokok dalam mewujudkan segenap tujuan HMI.

¹⁵ Solichin, Op. Cit., hal. 34-36.

4.2 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Pemerintahan Indonesia pada tahun 2020 kembali di pimpin oleh Presiden Joko Widodo untuk periode ke-2 nya setelah melewati periode pertama kepemimpinannya ditahun 2014-2019, pada awal kepemimpinannya di tahun 2020 cukup mengalami rintangan yang sedikit menghambat rencana-rencana pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan salah satunya adalah mengenai pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang tertunda akibat Covid-19. Pemerintahan Indonesia di tahun 2020 tentu tidak akan terlepas dari peran kepemimpinan politik yang dipegang oleh Joko Widodo sebagai Presiden, karena kepemimpinan adalah suatu proses bagaimana menata dan mencapai kinerja untuk mencapai keputusan sebagaimana yang diinginkannya.⁵

Pemilihan kepala daerah atau Pilkada adalah salah satu bagian instrumen terpenting dalam sebuah sistem demokrasi, yang di maksud dengan pilkada secara sederhana adalah proses pemilihan pemimpin yang akan memimpin dan menjadi orang nomor satu di daerahnya dengan cara pemilihan secara langsung oleh masyarakat di daerahnya.

Indonesia mengatur pelaksanaan pilkada di setiap daerah adalah dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun sekali atau dalam 1 periode kepemimpinan kepala daerah dapat berlangsung selama 5 tahun, setelah itu dapat dilakukan pelaksanaan pilkada untuk menentukan kepala daerah yang akan memimpin 5 tahun kedepannya. Dapat dipimpin kembali oleh kepala daerah sebelumnya atau justru melahirkan

¹⁶ Sulthon Syahril, " *Teori-Teori Kepemimpinan*", Jurnal Ri'ayah, Vol.04, no.02 (2010), hlm 209.

kepala daerah yang baru sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat karena sistem yang dipergunakan adalah pemilihan langsung yang dilakukan oleh masyarakat.

Dengan di tetapkannya masa jabatan kepala daerah selama 5 tahun dalam satu periode ini juga menggambarkan bagaimana pemerintah pusat dalam memberikan waktu bagi pemimpin di setiap daerahnya untuk dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik bagi daerah serta masyarakatnya, sebab salah satu tujuan di laksanakannya pilkada adalah untuk mendapatkan sorang kepala daerah yang benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat sehingga baik pemerintah daerah ataupun masyarakat senantiasa bekerja sama untuk memajukan daerahnya karena terdapat persamaan visi dan misi untuk bersama-sama mewujudkannya.

Pilkada tahun 2020 dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia dengan mencakup sebanyak 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota dengan jumlah total pemilih tetap mencapai 105 juta pemilih. Pilkada ini pada awalnya direncanakan dilaksanakan pada tanggal 23 september 2020 tetapi hal tersebut urung dilaksanakan karena ditahun yang sama pemerintah mengumumkan terdapatnya penyebaran awal virus Covid-19 di Indonesia. Pada senin, 2 Maret 2020, Presiden Presiden mengumumkan dua kasus pertama Covid-19. Dua kasus tersebut adalah seorang ibu berusia 64 tahun beserta putrinya yang berusia 31 tahun.⁶

¹⁷ Kompas.com (2022, 2 Maret), 2 Maret 2020, Saat Indonesia Pertama Kali Dilanda Covid-19. Diakses pada 30 Agustus 2022, dari <https://nasional.kompas.com/2-maret-2020-saat-indonesia-pertama-kali-dilanda-covid-19>

Atas pengumuman hal tersebut sempat membuat kondisi di masyarakat sedikit di landa kekacauan karena timbulnya rasa kepanikan di masyarakat akan penyebaran virus Covid-19 seperti halnya di negara lain hingga menyebabkan aktivitas masyarakatnya hampir lumpuh secara keseluruhan. Salah satu kepanikan dalam masyarakat adalah terjadinya panic buying, panic buying adalah perilaku membeli suatu kebutuhan dan menimbunnya dalam jumlah yang banyak pada saat terjadi situasi darurat tertentu.⁷ Salah satu panic buying yang dilakukan adalah dengan beramai-ramai masyarakat membeli bahan makanan serta masker secara berlebihan dan menyebabkan kelangkaan masker bahkan untuk tenaga medis sebagai pihak yang paling membutuhkan hal tersebut.

Atas munculnya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia membuat pelaksanaan pilkada pun mengalami perubahan pelaksanaan yang mana hal tersebut sebagai salah satu langkah antisipasi dari pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk dapat menekan dan meminimalisir angka penyebaran virus Covid-19 semakin meluas karena pada saat awal kemunculan kasus pertama menyebabkan kemunculan kasus-kasus berikutnya secara cepat.

Pemerintah beserta lembaga-lembaga negara yang berkaitan mengenai pelaksanaan pilkada pun akhirnya menyiapkan beberapa langkah dalam penundaan pelaksanaan pilkada tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan beberapa opsi mengenai tanggal yang dapat menjadi tanggal

¹⁸ Covidcare.id (2021, 16 Juli), Panic Buying di Masa Covid-19. Diakses pada 30 Agustus 2022, dari <https://covidcare.id/artikel/panic-buying-di-masa-pandemi-covid-19>

pelaksanaan pasti pilkada tahun 2020, KPU sudah memberikan opsi A,B, dan C, atau 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 23 september 2021.⁸ Dengan diberikannya opsi tersebut membuat setidaknya pemerintah memiliki gambaran tentang sisi positif dan negatif dari setiap opsi tanggal pelaksanaan pilkada yang di berikan oleh KPU.

Melalui beberapa opsi yang telah diberikan tersebut setidaknya pemerintah beserta stakeholder pemerintahan atau lembaga negara lainnya telah menetapkan bahwasanya tanggal 9 Desember 2020 adalah tanggal pasti pelaksanaan pilkada menggantikan tanggal 23 September 2020 yang mengalami penundaan. Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 ini bukan tanpa alasan, pemerintah telah memiliki hasil analisis secara mendalam yang pada akhirnya memunculkan sebuah hasil untuk penetapan tanggal pasti pilkada. Alasan pemerintah memilih opsi tanggal 9 Desember juga di jelaskan secara langsung oleh Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik yaitu Bapak Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si. dalam wawancara penelitian yang mana beliau memaparkan:

*“Tentu tidak lain bagaimana pada kesiapan perangkat penyelenggara di daerah masing-masing dan menyangkut 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Terutama baik kesiapan penyelenggara, pengawas, maupun kesiapan peserta dalam hal ini adalah pasangan calon terkait kondisi kita masih menghadapi pandemi, sampai dianggap relatif aman maka barulah diputuskan pada 9 Desember”.*⁹

¹⁹ Detik.com (2020, 14 April), Ini Opsi Tanggal Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Ditunda Gegara Corona. Diakses pada 30 Agustus 2022, dari [https://news.detik.com/ ini-opsi-tanggal-pelaksanaan-pilkada-2020-yang-ditunda-gegara-corona](https://news.detik.com/ini-opsi-tanggal-pelaksanaan-pilkada-2020-yang-ditunda-gegara-corona)

²⁰ Wawancara dengan Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si, 30 Agustus 2022.

Dengan pelaksanaan pilkada yang dilakukan secara serentak membuat pemerintah tidak dapat gegabah dalam memutuskan tanggal yang paling baik, disisi lain pemerintah juga tidak bekerja sendiri dalam memantapkan tanggal 9 Desember adalah tanggal pasti setelah penundaan yang terjadi melainkan terdapat beberapa elemen-elemen penting di pemerintahan serta pihak-pihak yang berkaitan erat dengan konteks pemilihan umum.

Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si. secara lebih lanjut juga menyebutkan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam penetapan tanggal untuk pelaksanaan pilkada 2020 ini, yaitu beliau menerangkan:

“Penetapan tersebut tidak serta merta kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Presiden telah mendelegasikan melalui asas dekonsentrasi kepada Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas untuk melakukan konsultasi dengan Komisi II-DPR karena atas dasar itu Komisi II DPR mengundang KPU RI, Bawaslu RI. Disitulah dilakukan rapat kerja dan rapat kerja tersebut menghasilkan keputusan-keputusan yang telah melalui diskusi yang panjang.”¹⁰

Hal tersebut setidaknya menandakan asas demokrasi yang dipakai Indonesia berjalan dengan baik dengan bagaimana cara pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan yang dapat memberikan efek besar terhadap masyarakat tidak melakukannya sendiri, melainkan mengajak berbagai pihak untuk dapat memberikan masukan, memberikan pendapat secara bebas agar menghasilkan kesimpulan yang pasti dari apa yang telah di sampaikan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penetapan tanggal 9 Desember 2020.

²¹ Wawancara dengan Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si, 30 Agustus 2022.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Pengamat politik dari Citra Institute yang juga seorang Akademisi Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo Bapak Yusa Farhan, S.Sos., M.Si menjabarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu pihak yang mempunyai andil besar dalam kebijakan pilkada ini. Peran yang sangat signifikan dimiliki oleh DPR karena merupakan tempat dari berkumpulnya elite partai politik yang mengesahkan tetap dilaksanakannya pilkada salah satunya demi kepentingan partai politik, lebih lengkap beliau menjabarkan dalam wawancara penelitian adalah sebagai berikut:

*“Tentu DPR ya, karena kewenangan itu ada pada DPR terutama di teman-teman komisi II yang merupakan representasi dari fraksi-fraksi partai politik yang ada di parlemen semuanya sepakat untuk tetap melaksanakan pilkada ya saya kira tidak ada yang bisa membendung karena memang kewenangan itu ada di selain pemerintah kan DPR terutama fraksi-fraksi partai politik dan partai politik perlu diingat memang mereka jadi satu-satunya instrumen rekrutmen politik. Jadi mau masyarakat menolak setiap hari demo seratus kali ya kalau senayan tetap berkehendak jalan ya jalan jadi tidak ada yang bisa menghalangi mereka”.*¹¹

Dengan segala problematika yang terjadi yang diharapkan masyarakat tentunya pelaksanaan pilkada yang melahirkan pemimpin-pemimpin baru mampu untuk menggunakan kekuasaannya secara baik terlebih dengan situasi pandemi banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bantuan akibat terdampak dari sektor ekonomi, para elite politik yang mengikuti pilkada diharapkan jangan

²² Wawancara dengan Yusa Farhan, S.Sos., M.Si, 10 April 2022.

hanya menggunakan kekayaan yang mereka miliki hanya untuk mendapatkan kekuasaan dan mengembalikan modal yang dipakai selama masa pencalonan dirinya tetapi lebih kepada mendorong masyarakat agar mampu keluar dari jerat masa-masa sulit selama pandemi Covid-19.

Penetapan jadwal Pilkada 2020 telah melalui pembahasan dan kajian yang mendalam antara pemangku kebijakan terkait dan telah di putuskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Regulasi itu telah disahkan pada 17 Juli 2020 menjadi undang-undang.¹²

Kebijakan yang tetap dilaksanakan di tengah situasi pandemi Covid-19 kita dapat kembali melihat bagaimana cara pembuatan serta penetapan kebijakan tersebut secara menyeluruh karena sejatinya pemerintah dalam menetapkan sebuah kebijakan pasti akan melewati proses bagaimana perumusan kebijakan itu dibuat dan dasar pemikiran apa saja yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan.

Keterkaitan lembaga-lembaga negara juga menjadi hal penting untuk dapat memberikan pandangan sebelum pemerintah dan para stakeholder menetapkan tanggal pasti pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020. Langkah-langkah dalam perumusan kebijakan yang nantinya akan di implementasikan di masyarakat adalah:

²³ Dpr.go.id (2020, 4 Agustus), Anggota DPR Tepis Wacana Penundaan Pilkada Serentak 2020. Diakses pada 30 Agustus 2020, dari <https://www.dpr.go.id/berita/Anggota+Dpr+Tepis+Wacana+Penundaan+Pilkada+Serentak+2020>

1. Dirumuskannya sebuah masalah.

Langkah awal dalam membuat kebijakan adalah harus mampu memahami atau mengenali secara mendalam dari sebuah masalah untuk dapat masuk kedalam perumusan, maka dari itu permasalahan yang terjadi di masyarakat harus dikenali serta harus didefinisikan secara cermat karena pada dasarnya lahirnya sebuah kebijakan adalah untuk memecahkan masalah yang terdapat di masyarakat.

2. Mengagendakan Kebijakan.

Tidak semua dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dapat masuk dengan mudah kedalam agenda kebijakan, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi apabila permasalahan tersebut dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Seperti masalah yang terjadi di masyarakat atau ruang publik sudah menimbulkan efek negatif yang cukup besar bagi keadaan di sekitarnya maka dengan hal tersebut masalah publik seperti virus Covid-19 dapat masuk kedalam agenda kebijakan yang nantinya akan dibahas secara mendalam oleh perumus kebijakan yang berasal dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan

Tidak semua masalah akan mampu dipecahkan dengan satu kebijakan saja melainkan didalamnya terdapat beberapa pilihan alternatif kebijakan yang dapat digunakan apabila suatu kebijakan dirasa kurang mampu dan tidak terlalu efektif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi

di masyarakat. Pemilihan alternatif kebijakan juga dapat disebabkan oleh pertarungan dari beberapa kepentingan yang dimiliki oleh setiap aktor perumus kebijakan.

4. Tahap Penetapan Kebijakan.

Setelah tahap perumusan dan pemilihan alternatif kebijakan selesai maka tahap selanjutnya adalah tahap dilaksanakannya kebijakan untuk memecahkan sebuah masalah, alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya adalah hasil dari kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut.¹³

Dengan hal tersebut maka sebetulnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai tetap dilaksanakannya pilkada ditengah pandemi Covid-19 sudah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan perumusan kebijakan yang baik, terlebih pilkada merupakan pesta dari negara dengan corak demokrasi seperti Indonesia dan pelaksanaan pilkada atau pemilihan umum juga menjadi sebuah amanat yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah sebab Undang-Undang telah mengatur semua pelaksanaan tersebut.

Bahkan Undang-Undang juga mewajibkan negara untuk dapat melaksanakan pemerintahan agar tercapai keadilan dan kemakmuran serta terpenuhi semua kebutuhan masyarakat di Indonesia tanpa harus adanya masyarakat yang merasa dibebankan dan hak asasi manusia menjadi terlupakan atas dasar kekuasaan.

²⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, (2020), hlm. 125.

Pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020 juga memiliki tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat agar dalam pelaksanaan dan hasil yang didapatkan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat di masa yang akan datang. Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si. selaku Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia menjelaskan dalam wawancara penelitian mengenai tujuan utama dari pemerintah dalam melaksanakan Pilkada tahun 2020 adalah :

“Siklus konstitusional yang dalam pilkada 5 tahun sehingga kalau hal tersebut di tunda-tunda akan menimbulkan hal yang kurang baik bagi legitimasi pemerintahan. Serta memberikan kepastian hukum dan kepastian status pemerintahan sehingga semua program dapat berjalan dengan baik, tentu dimanapun tidak ada pemerintah yang memiliki niat jahat pasti memiliki niat yang baik. Tetapi, satu keyakinan bahwa pemerintah beritikad baik, pemerintah punya tanggung jawab bepegang pada peraturan perundangan untuk menyelenggarakan pilkada pada waktunya sehingga siklus mekanisme kepemimpinan dan pemimpin yang diteliti dari calon pasangan daerah terpilih secara demokratis, jujur, adil, dan legitimatif”¹⁴

Pernyataan tersebut tentu saja telah memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pemerintah tetap menjalankan apa yang telah diamanahkan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu landasan bagi pemerintah untuk dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik. Dengan keyakinan bahwasanya pelaksanaan pilkada dapat dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 tetapi mampu menghasilkan kepala daerah yang terpilih secara demokratis, jujur, adil, dan legitimatif.

²⁵ Wawancara dengan Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si, 30 Agustus 2022.

Terlepas dari bahwasanya pelaksanaan pilkada pada tahun 2020 digelar dalam keadaan kesehatan masyarakat yang sedikit mengalami gangguan tetapi setidaknya pemerintahan yang di pimpin oleh Presiden Joko Widodo memiliki keyakinan yang kuat akan hasil baik yang diberikan kepada masyarakat dari pemerintah dengan menjalankan amanat dari apa yang tertuang dalam perundang-undangan meskipun terdapat hambatan kesehatan yang mengancam seluruh wilayah negeri.

Keyakinan pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo ini pula dapat di cermati tertuang dalam teori kepemimpinan politik yang termasuk kedalam variable yang mempengaruhi kepemimpinan politik yaitu adalah kognisi atau keyakinan dimana pemimpin mampu untuk memiliki sebuah keyakinan tentang sifat politik yang berkeyakinan tinggi untuk dapat membawa kearah yang lebih baik apapun rintangan yang terjadi sehingga mampu merumuskan dan mengimplementasikan seluruh program kerja untuk berjalan dengan baik dan lancar guna memakmurkan keadaan sosial di masyarakat.

Sifat juga merupakan salah satu hal yang terdapat dalam variable dalam teori kepemimpinan politik dimana sifat dari pemimpin seperti ramah, selalu berhati-hati dan keterbukaan terhadap hal-hal baru juga akan menggambarkan bagaimana sekiranya pemerintahan tersebut akan terlaksana. Dalam kepemimpinan politik Joko Widodo dirinya memiliki sifat ramah di tunjukan dengan seringnya beliau dalam mengunjungi masyarakat seperti blusukan. Kebiasaan blusukan juga dibawa ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, hingga

kini saat menjabat sebagai Presiden kebiasaan itu pula yang dibawanya.¹⁵ Dengan seperti itu membuat citra seorang Presiden Joko Widodo di mata masyarakat cukup baik dan di senangi oleh kebanyakan masyarakat. Gaya kepemimpinan seperti itu membuat ia terlihat karib dengan rakyatnya.¹⁶

Kondisi masyarakat yang masih berada didalam kondisi yang kurang kondusif baik dari segi sosial bahkan ekonomi karena selama pandemi tentunya membuat beberapa masyarakat kehilangan pekerjaan karena memang beberapa sektor pekerjaan mengalami penurunan pendapatan selama pandemi sehingga mau tidak mau harus mengurangi jumlah karyawan. Terlebih pilkada tahun 2020 dilaksanakan secara serentak yang berarti dilakukan di beberapa daerah di Indonesia dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang berbeda-beda, pemerintah tentunya memiliki pandangannya sendiri akan perbedaan mengenai tingkat kerawanan akan penyebaran Covid-19 sehingga menunda pelaksanaan pilkada meskipun pada akhirnya tetap dilaksanakan ditahun yang sama. Pandangan dari pemerintah dalam melihat kondisi sosial di masyarakat hingga tetap melaksanakan pilkada di tahun 2020 di sampaikan kembali oleh bapak Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si.yang menyampaikan :

“Tingkat kegawatan dan kerawanan Covid-19 berbeda-beda, pemerintah melalui kementerian kesehatan tentu punya data. Di Sumatera tentu tidak sama dengan di Jakarta, pada umumnya kalau kami perhatikan kerawanan Covid-19 lebih di daerah kota-kota besar yang merupakan kota metropolitan. Itulah

²⁶ Kompas.com (2019, 9 April), Merakyat, Gaya Kepemimpinan Jokowi. Diakses pada 16 April 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/09/15015521/merakyat-gaya-kepemimpinan-jokowi>

²⁷ Ibid

dasar kenapa pemerintah beserta stakeholder lainnya menetapkan tanggal 9 Desember sebagai pelaksanaan Pilkada”¹⁷.

Dengan tingkat kegawatan yang berbeda-beda ada beberapa wilayah yang memang tinggi dalam angka penyebaran tetapi terdapat pula beberapa daerah yang mampu meminimalisir tingkat penyebaran kasusnya. Disisi lain kebijakan pilkada yang diberlangsungkan ditengah pandemi tentu ini memberikan dampak atau keadaan yang berbeda secara signifikan di masyarakat, ada sebagian yang mendukung tetapi sebagian justru menolak.

Desakan penundaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 di sampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), ormas islam NU dan Muhammadiyah, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya. Desakan itu mempertimbangkan perkembangan pandemi Covid-19 di Tanah Air yang belum juga mereda.¹⁸ Hal ini pula yang disampaikan oleh pengamat politik Citra Institute, Yusa Farchan, S.Sos., M.Si dimana dirinya mengatakan tentang keadaan masyarakat pada saat itu:

“keadaan sosial ekonomi masyarakat pada saat itu ya secara sosial kita dihadapkan pada sistuasi covid yang situasinya tidak seperti saat ini karena sudah mulai mereda kalau dulu kan memang kenapa civil society ini ramai-ramai menolak karena dikhawatirkan pemungutan suara itu berpotensi menjadi claster baru munculnya titik-titik baru Covid-19 sehingga teman-teman ramai-ramai menolaknya”¹⁹

²⁸ Wawancara dengan Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si, 30 Agustus 2022.

²⁹ Nasional.tempo.co (2020, 29 September), Masyarakat Dukung Pilkada Serentak 2020 Ditunda. Diakses pada 30 Agustus 2022, dari <https://nasional.tempo.id/masyarakat-dukung-pilkada-serentak-2020-ditunda>

³⁰ Wawancara dengan Yusa Farhan, S.Sos., M.Si, 10 April 2022.

Meskipun beberapa penolakan terjadi tetapi kebijakan tersebut tetap dikeluarkan dan setiap warga negara harus mengikuti sesuai dengan kebijakan pemerintah sebagai bentuk implementasi warga negara yang baik, selain hal tersebut sebenarnya peningkatan cluster-cluster Covid-19 bukan hanya disebabkan oleh ada atau tidaknya konstentasi pilkada tetapi ada dalam kerumuan lain yang bisa meningkatkan Covid-19.²⁰

Dinamika persoalan yang muncul akibat Covid-19 memang menjadi persoalan universal, disisi lain pemerintah dan lembaga terkait bersikukuh untuk tetap memulai konstentasi pilkada 2020 pada 9 desember mendatang.²¹ Tetapi di dalam pengamatan seorang pengamat politik memang ada alasan tersendiri yang dimiliki oleh pemerintah sehingga yakin untuk tetap melaksanakan pilkada, karena ada alasan untuk memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat bahwasanya pandemi ini dapat terselesaikan maka dari itu pilkada tahun 2020 pun tetap dilaksanakan, seperti apa yang kembali disampaikan oleh Pengamat Politik Citra Institute yaitu Yusa Farchan, S.Sos., M.Si mengatakan:

“Tetapi secara umum kembali ke tahun 2020 kemarin dengan indikator atau pelaksanaan pilkada kemarin saya kira ini juga menjadi catatan tersendiri ya, memang kita melihat optimisme publik yang ingin dibangun. Jadi begini, pemerintah punya perspektif lain bagaimana menghadirkan pilkada ini sebagai instrumen untuk membangun optimisme dalam

³¹ Kominfo.go.id (2020, 14 Desember), Pelaksanaan Pilkada Serentak relatif aman, Mendagri apresiasi kerja keras semua pihak. Diakses pada 17 april 2022, dari [kominfo.go.id /pelaksanaan-pilkada-serentak-relatif-aman-mendagri-apresiasi-kerja-keras-semua-pihak/pemilihanserentak](http://kominfo.go.id/pelaksanaan-pilkada-serentak-relatif-aman-mendagri-apresiasi-kerja-keras-semua-pihak/pemilihanserentak)

³² Singgih Choirul Rizki, Yusuf Adam Hilman, “menakar perbedaan opini dalam agenda pelaksanaan kontentasi Pilkada serentak di tengah covid-19”, Jurnal Ilmiah Muqoddimah, vol. 4, no.2 (2020), hlm 153.

*menyelesaikan pandemi, itu pesan yang ingin kita tangkap dari pemerintah”.*²²

Tetapi optimisme itu juga perlu dijaga oleh pemerintah dengan harus tetap melaksanakan pilkada dengan sebaik mungkin jangan sampai kualitas dari pilkada itu sendiri menurun dengan alasan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, karena harapan masyarakat saat itu adalah lebih kepada perhatian pemerintah dibidang kesehatan bukan pada bidang politik meskipun pergeseran tanggal pelaksanaan pilkada adalah hal yang legal karena ada payung hukum yang mendasari hal tersebut.

Jika dilihat secara keseluruhan mengenai kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2020 memang cukup baik dimana dengan pribadi yang cukup dengan masyarakat dan tak segan untuk berkomunikasi secara langsung cukup membuat kepercayaan publik kepada dirinya tinggi, serta tidak serta merta mengambil sebuah keputusan secarasendiri tetapi ikut melibatkan beberapa pihak untuk memberikan pandangannya. Tetapi, perlu di catat bahwasanya dalam menjalankan politik harus tetap menggunakan etika dan moral karena hal itulah yang menjadi dasar untuk mampu membawa pemerintahan kearah yang lebih baik. Politik juga bukan semata-merta tentang kekuasaan melainkan usaha untuk mencapai masyarakat yang lebih baik, sehingga dengan etika dan moral yang baik dan benar maka keadaan masyarakat yang lebih baik akan dapat terwujud.²³

³³ Wawancara dengan Yusa Farhan, S.Sos., M.Si, 10 April 2022.

³⁴ Anang Setiawan, Erinda Alfiani Fauzi, “Etika Kepemimpinan Politik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia”, Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan, vol. 1, no.1 (2019), hlm 11.

Diharapkan juga oleh masyarakat pada pilkada 2020 tidak terjadi aksi kecurangan di dalamnya, jangan sampai karena kondisi pandemi yang terjadi justru membuat pengawasan keamanan pada pilkada menjadi berkurang. Mengingat pelaksanaan pilkada di masa normal pada pilkada yang lalu masih terjadi banyak kecurangan dari berbagai pihak.²⁴ Kecurangan dalam pilkada atau dalam pemilihan umum yang sering kali kita temui adalah “serangan fajar” atau pembelian hak suara dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat agar memilih calon yang dikehendaki.



³⁵ Wahyu Wiji Utomo, “Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (menghadapi Pilkada di tengah Covid 19 dan New Normal)”, Jurnal Al-Harakah, vol. 3, no. 1 (2020), hlm 38.